BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia dan belahan dunia Islam (muslim word) lainnya menginginkan sistem perekonomian berbasis nilai – nilai dan prinsip syariah (Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Dan sudah lebih dari satu dekade fenomena syariah mulai bermunculan dan dikenal di Indonesia. Masyarakat mulai meyakini bahwa lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip dan nilai syariah akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan, sehingga persepsi masyarakat mengenai negative spread dapat dihilangkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah dan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) / BMT (Baytul Ma<1 wat Tanwil).

Koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan kalangan masyarakat ketika menyikapi maraknya pertumbuhan *baytul ma<l wattamwil* di Indonesia. *Baytul ma<l wattamwil* biasa disebut dengan BMT yang dimotori pertama kali oleh BMT Insan Kamil di Jakarta pada tahun 1992, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian para pengusaha mikro.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001) viii

² Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi (Jakarta: Erlangga, 2002), 10.

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syariah (Kelomok Swadaya Masyarakat Syariah) namun demikian BMT memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasikannya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap. Dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana mayarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank. Maka berdirilah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi BMT. BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi.³

Akan tetapi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian Undang-Undang Koperasi No.25 tahun 1992 menjadi UU No.17 tahun 2012. Dalam rapat tersebut Menteri koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi UU No.25 tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. Kemudian pada bulan Desember 2012 UU No.17 tahun 2012 ini disahkan. Dalam Undang-Undang ini pemerintah memberi peluang bagi berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang dijelaskan dalam pasal 87

³ Ibid., 11.

ayat 3, yang berbunyi "koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah".

Pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha khususnya dengan pola syariah yang telah dan akan dikelola melalui koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat. Praktek usaha koperasi yang dikelola KJKS/BMT telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi mayarakat khususnya kalangan usaha kecil dan mikro.⁴

Berkembangnya KJKS/BMT di Indonesia mengandung banyak kontroversi dari masyarakat. Masalah yang paling banyak disorot adalah mengenai pelekatan label koperasi syariah pada lembaga keuangan Islam yang dianggap masih belum layak. Hal tersebut timbul karena persepsi dari masyarakat yang ragu akan konsistensi bisnis syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.⁵ Namun disisi lain, berkembangnya KJKS/BMT membuka pasar baru bagi masyarakat yang berminat dan berniat menyempurnakan aturan syariah melalui ekonomi syariah yang bebas dari bunga.

umum prinsip manajemen BMT adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut sudah sesuai dengan sudut pandang syariah yaitu prinsip ta'a<wun

⁵ Prasetyaningsih, Islamic Corporate Identity dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Syariah (Jakarta: Binarupa Aksara, 2010), 17.

⁴ Kementerian Koperasi, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Jakart: Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM, 2005), 1.

(tolong-menolong) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui prinsip manajemen tersebut perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.

Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan bagi para anggotanya tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan menciptakan roda perekonomian yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Terlebih bagi pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dimana perbankan masih sulit dijangkau, maka disini peran koperasi tentu sangat diharapkan.

Konsep koperasi memang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi berbeda halnya dengan KJKS/BMT dimana perkembangannnya belum menyentuh semua kawasan nusantara. Terutama bagi masyarakat desa terpencil yang kurang mampu mengikuti perkembangan zaman, sistem syariah seperti masih terdengar asing ditelinga sebagian besar masyarakatnya. Seperti yang terjadi di desa Kenduren kecamatan Wedung kabupaten Demak suatu daerah yang masih "alami" karena cukup jauh dari perkotaan dan belum terjamah perkembangan dimana hanya terdapat satu perbankan yaitu bank BRI (konvensional) dalam satu kecamatan dan atau 20 kelurahan, keberadaan koperasi tentu menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar.

⁶ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 96.

Peran koperasi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bukanlah hal yang baru, karena sudah sejak tahun 1990an koperasi menjadi pilihan masyarakat desa untuk menabung maupun melakukan pinjaman dana dikala perbankan sulit dijangkau karena lokasi yang jauh atau prosedur yang dianggap rumit. Meskipun koperasi umum sudah cukup akrab dengan masyarakat Wedung namun berbeda halnya dengan koperasi syariah, yang hingga kini hanya terdapat satu koperasi yang berbasis syariah dalam satu kecamatan, yaitu BMT Ben Makmur.

BMT Ben makmur mulai beroperasi pada tanggal 20 Maret 2001 dengan modal awal Rp. 49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan jumlah karyawan 3 orang. BMT Ben Makmur merupakan gerakan koperasi yang diprakarsai oleh LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Al Manar yang berlokasi di Desa Kenduren Kec. Wedung Kab. Demak. Gerakan ini merupakan bentuk peningkatan dari fungsi dan kinerja LAZIS dengan mengoptimalkan fungsi *Baytul Ma*<*l* sebagai upaya sosialekonomi yang sangat strategis bagi pembangunan umat. BMT Ben Makmur merupakan BMT yang berdiri sendiri dan hingga kini belum memiliki kantor unit maupun cabang.

Pengesahan badan hukum BMT Ben Makmur diterbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Demak dengan Nomor Badan Hukum : 01/BH.11-03/X/2001.⁸ Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar petani serta pengusaha mikro dan mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat

⁸ Keputusan RAT BMT Ben Makmur, Demak, 2002.

⁷ Bapak Muhayyun, Manajer di BMT Ben Makmur, *Wawancara*, Demak, 10 Oktober 2014.

muslim yang taat, keberadaan koperasi syariah seharusnya bisa lebih unggul daripada ekonomi konvensional karena sistem yang dijalankan dinilai lebih adil dan pro-kesejahteraan.

BMT Ben Makmur yang menjadi satu-satunya KJKS/BMT yang beroperasi di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak harus memilik konsep manajemen yang bagus dan terarah. Hal ini sangat perlu diperhatikan demi menjaga kepercayaan masyarakat serta untuk strategi bersaing terhadap lembaga keuangan non syariah yang lebih dominan dan telah berkembang terlebih dahulu. Penilaian kesehatan manajemen BMT dilakukan dengan memperhatikan peraturan kesehatan koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Penilaian Kinerja Manajemen BMT dapat ditinjau dari 5 aspek sebagai berikut:

- a. Manajemen umum.
- b. Kelembagaan.
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen aktiva.
- e. Manajemen likuiditas.

Pada dasarnya ruang lingkup penilaian kesehatan KJKS/BMT dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 meliputi 8 (delapan) aspek, vaitu:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas Aktiva Produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan;
- g. Jatidiri Koperasi;
- h. Prinsip Syariah.

Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan fokus pada penilaian manajemen saja, karena dalam manajemen ada lima aspek penting dalam KJKS/BMT yang bisa diteliti yaitu antara lain, meneliti kelengkapan prosedur maupun kebijakan umum yang mendasari kegiatan BMT, sarana prasarana yang mendukung operasional, serta program pemasaran dalam aspek manajemen umum. Dalam kelembagaan akan diteliti berkaitan tentang kelengkapan struktur organisasi dan *job describtion*. Akan diteliti juga berkaitan tentang pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) maupun simpanan BMT dalam aspek manajemen permodalan. Kemudian dalam manajemen aktiva akan diteliti berkaitan tentang kas dan pembiayaan yang disalurkan. Dan terakhir dalam aspek manajemen likuiditas berkaitan tentang kondisi likuiditas KJKS/BMT.

Hal tersebut didasarkan pada survey pertama yang penulis lakukan di BMT Ben Makmur dimana penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu diantaranya adalah pertama, kurangnya strategi pemasaran oleh BMT dimana hal tersebut terlihat dari tidak adanya program khusus BMT untuk meningkatkan jumlah simpanannya, serta tidak ditemukannya spanduk maupun banner BMT Ben Makmur di sepanjnag jalan menuju lokasi kantor BMT, padahal kantor berlokasi di daerah yang jauh dari keramaian, dimana hal tersebut dapat menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat luas akan eksistensi BMT Ben Makmur.

Kedua, pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT Ben Makmur yang terus mengalami penurunan, dimana jika dibiarkan terus menerus akan mempengaruhi kondisi finansial lembaga.

BMT Ben Makmur sebagai lembaga keuangan harus selalu mamantau dan memperhatikan tingkat kinerja manajemennya dengan baik demi kontrol kinerja untuk mempertahankan kelangsungan operasional serta untuk menghadapi persaingan sesama jenis usaha. Hal ini juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan BMT dalam menjalankan fungsinya agar mampu membenahi kekurangan dan terus berpacu untuk meningkatkan keberhasilan. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Maka dari itu diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tatacara yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian kinerja manajemen untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan serta sebagai

pembelajaran atas apa yang telah dicapai untuk menjaga stabilitas agar terwujud pengelolaan manajemen yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri BMT dan prinsip syariah. Hal inilah yang mengilhami dan mendorong peneliti untuk mengambil judul penelitian "Evaluasi Kinerja Manajemen Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung kabupaten Demak Tahun Buku 2013)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka sangat penting bagi penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kinerja manajemen operasional yang terjadi di BMT Ben Makmur.
- 2. Kebijakan-kebijakan tertulis BMT tentang kegiatan utamanya (simpanpinjam).
- Konsistensi penerapan prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT Ben Makmur.
- 4. Strategi pemasaran pada BMT Ben Makmur.
- 5. Kelembagaan yang ada di BMT Ben Makmur.

_

⁹ Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 8.

- 6. Kondisi permodalan BMT Ben Makmur.
- 7. Pengelolaan aktiva di BMT Ben Makmur.
- 8. Strategi BMT Ben Makmur untuk menjaga likuiditasnya.
- Penilaian kinerja manajemen BMT Ben Makmur berdasarkan Peraturan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

Dari identifikasi masalah tersebut, kemudian ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas. Penulis membatasi masalah yang ada untuk mempermudah proses penelitian di lapangan. Batasan masalahnya adalah:

- 1. Menganalisis kinerja manajemen BMT Ben Makmur.
- Melakukan penilaian kinerja manajemen BMT Ben Makmur berdasarkan Peraturan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana kinerja manajemen BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
- Bagaimana efektifitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur berdasarkan
 Peraturan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007?

¹⁰ Ibid., 8.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.¹¹

Permasalah yang berhubungan dengan penilaian kinerja koperasi telah dibahas dalam skripsi sebelumnya, antara lain oleh Yenis (2009), melakukan analisis kinerja keuangan koperasi syariah KSU "Para Mukti Mulya" Banyuwangi. Metode analisis yang digunakan yaitu berupa rasio modal sendiri terhadap total modal, rasio efisiensi, likuiditas, rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan rasio partisipasi bruto. Hasil yang didapat secara keseluruhan mengalami kenaikan yaitu pada rasio likuiditas, rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan rasio partisipasi bruto dari tahun 2007-2009. Rasio modal sendiri terhadap total modal dari tahun 2007-2009 mengalami penurunan. Objek dari penelitian skripsi tersebut adalah menganalisis pengembangan usaha pada koperasi yang telah memiliki 10 cabang yang tersebar diberbagai daerah diantaranya, di daerah kota Blitar, Nganjuk, Kediri, Bogor, Ciledug, Tambun, Pondok Kopi, Sukabumi, Mojokerto dan Madiun. 12 Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini adalah sebuah BMT yang tumbuh dan berkembang di desa terpencil dan belum memiliki kantor cabang dimanapun. Kemudian dalam penelitian tersebut

¹¹Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 8.

¹²Yenis Pratiwi, "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Syariah KSU Para Mukti Mulya Banyuwangi" (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2010), 1.

diatas peneliti memfokuskan pembahasan terhadap aspek keuangan saja, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti dalam skripsi ini akan fokus pada kinerja manajemen dari BMT Ben Makmur, didalam aspek manajemen disamping membahas manajemen secara umum juga akan membahas manajemen keuangannya yaitu manajemen permodalan, aktiva dan likuiditas, jadi penelitian ini cakupannya lebih luas.

Peneliti berikutnya adalah penelitian Mutmainnah yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Putra Mandiri di Kabupaten Jember". Dalam skripsi ini peneliti melakukan penilaian kinerja keuangan KSU Putra Mandiri di Kab. Jember dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh langsung dari KSU "Putra Mandiri". Metode analisis yang digunakan adalah analisis Rasio menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.3/ Per/ M.KUKM/ X/ 2007, analisis *Trend* dan analisis *common size*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Beberapa rasio yang mengalami kenaikan yaitu rasio modal sendiri terhadap total modal, rasio efisiensi dan rasio aktiva tetap terhadap total aset, sedangkan beberapa rasio yang mengalami penurunan yaitu rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional pelayanan serta rasio likuiditas

menunjukkan kenaikan dan penurunan.¹³ Sama seperti penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini sang peneliti hanya memfokuskan pada kinerja keuangannya saja sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas akan meneliti tentang kinerja manajemen dimana ada lima variabel dalam kinerja manajemen tersebut, yaitu manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas.

Berikutnya adalah Fauzia Ratih Ismaya "Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menggunakan Metode Camel Pada Baituttamwil Tamzis Wonosobo" Penelitian mengukur tingkat kesehatan BMT Tamzis Wonosobo menggunakan metode CAMEL periode tahun 2008-2012. CAMEL memiliki lima aspek, aspek permodalan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), aspek kualitas aktiva produktif rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), Penelitian bersifat kuantitatif. Pedomannya adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan keuangan BMT Tamzis Wonosobo. Hasil dan pembahasan semua faktor CAMEL dalam kategori sehat kecuali pada faktor rentabilitas.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang kesehatan koperasi dengan berpedoman pada Keputusan Menteri

Mutmainnah, "Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuanga Syariah Menggunakan Metode Camel Pada Baituttamwil Tamziz Wonosobo" (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2013), 1.
 Fauzia Ratih Ismaya, "Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menggunakan Metode Camel Pada Baituttamwil Tamzis Wonosobo" (Skripsi--Undip, Semarang, 2012), 1.

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004, dimana pedoman Keputusan Menteri tersebut adalah ditujukan untuk koperasi konvensional, sedangkan dalam skripsi ini penulis menggunakan pedoman Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, dan Pedoman Peraturan Menteri yang penulis gunakan ini adalah Pedoman untuk kesehatan koperasi Syariah.

Dan penulis disini akan mengadakan penelitian tentang kinerja manajemen koperasi dengan judul "Evaluasi Kinerja Manajemen Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Buku 2013)". Judul ini adalah sebagai pengembangan dari judul-judul yang sebelumnya yang telah dibahas yaitu masalah kinerja koperasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan hanya fokus pada kinerja manajemen dari BMT Ben Makmur, karena aspek manajemen disamping membahas manajemen secara umum juga membahas manajemen keuangannya yaitu manajemen permodalan, aktiva dan likuiditas. Dan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004, dan Menengah Republik sedangkan dalam skripsi ini peneliti menggunakan pedoman Peraturan

Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena yang menjadi objek penelitian sebelumnya adalah koperasi konvensional, serta KJKS/BMT yang telah cukup maju dan memiliki banyak kantor cabang. Dan disini penulis menjadikan BMT Ben Makmur yang manjadi satu-satunya KJKS/BMT beroperasi di suatu daerah terpencil di kabupaten Demak, sehingga dianggap perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja manajemen untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan sekaligus mengetahui bagaimana potensi perkembangan BMT di daerah setempat.

Sehingga *output* yang diharapkan dari penelitian ini adalah penilaian terhadap kinerja manajemen BMT Ben Makmur berdasarkan Peraturan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

E. Tujuan Penelitian

- Untuk menjelaskan bagaimana kinerja manajemen BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Untuk menjelaskan bagaimana efektifitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur berdasarkan Peraturan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

F. Manfaat Penelitian

- Dari segi teoritis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan studi bagi mahasiswa selanjutnya yang berkaitan dengan koperasi syariah khususnya Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah.
- 2. Dari segi praktis sebagai informasi dan pedoman bagi pelaku koperasi syariah di Indonesia pada umumnya dan di Demak pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep / variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud mengenai judul "Evaluasi Kinerja Manajemen Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung kabupaten Demak Tahun Buku 2013)" diantaranya:

Evaluasi Kinerja Manajemen : adalah melakukan penilaian/pengukuran Koperasi Syariah terhadap hasil kerja manajemen yang telah dicapai oleh koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah (BMT).

¹⁵Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kinerja manajemen berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 mencakup 5 (lima) faktor yang akan diteliti, yaitu:

- Manajemen Umum: adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang meliputi operasional, pemasaran, dan lain sebagainya.¹⁶
- 2. Kelembagaan: adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota dalam suatu organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷
- 3. Manajemen Permodalan: adalah cara mengatur, mengelola dan mengalokasikan modal dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang optimal atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.
- 4. Manajemen Aktiva: diartikan sebagai manajemen tentang kekayaan atau harta milik perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan mengatur penempatan uang agar kekayaan itu menjadi berkembang dan perusahaan tetap dalam posisi yang menguntungkan serta aman dalam resiko bisnis. ¹⁸
- 5. Manajemen Likuiditas: didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk

¹⁶ Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 2.

¹⁷ Ibid., 286.

¹⁸Arif Sugiono, *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 11.

memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga.¹⁹

Peraturan Menteri Negara : adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan nomor 35.3 Tahun 2007. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2007 oleh Suryadharma Ali

sebagai Menteri Negara Koperasi pada saat

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

itu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami situasi, kondisi, motivasi, dan kegiatan yang terjadi di BMT Ben Makmur dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

¹⁹ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 482.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17.

1. Data Dihimpun

Berdasakan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dihimpun meliputi :

A. Data Primer

Data primer yang penulis himpun merupakan data yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi, yang diantaranya adalah:

- a. Data tentang manajemen umum BMT Ben Makmur yang meliputi kebijakan-kebijakan tertulis mengenai operasional, standar akuntansi, sistem administrasi, dan strategi pemasaran.
- b. Data tentang kelembagaan BMT Ben Makmur yang meliputi antara lain: SK Pengurus tentang kontrak manajemen, pelatihan anggota, susunan organisasi dan lain sebagainya.
- c. Data tentang permodalan BMT Ben Makmur yang meliputi antara lain: tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan SHU, jumlah simpanan dan lain sebagainya.
- d. Data tentang kualitas aktiva BMT Ben Makmur yang meliputi antara lain: tingkat pertumbuhan asset, dana cadangan penghapusan pembiayaan, jumlah pinjaman macet, dan lain sebagianya.
- e. Data tentang likuiditas BMT Ben Makmur yang meliputi antara lain: dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), MOU kerjasama dengan lembaga keuangan lain, analisa rasio keuangan jangka pendek, dan lain sebagainya.

B. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis himpun merupakan data yang berasal dari website resmi departemen koperasi dan berbagai literatur buku, yaitu antara lain:

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
- b. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- c. Teori tentang manajemen perkoperasian.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), maka sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sumber Data Primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian, baik oleh peneliti perorangan maupun organisasi.
 Misalnya melalui wawancara dan dokumentasi.²¹
- b) Sumber Data Sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²² Misalnya melalui data statistik, hasil riset, koran, internet dan lain sebagainya. Sumber data sekunder tersebut yaitu antar lain:
 - i. www.depkop.go.id

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

²² Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

- ii. Depertamen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, *PanduanUnit Simpan Pinjam Syariah*, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1998)
- iii. Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- iv. Nur Buchori, Koperasi Syariah, (Sidoarjo: Mashun, 2009)
- v. Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data yang mana.

a. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu seperangkat pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan agar wawancara berlangsung efektif' dan diperoleh informasi yang dibutuhkan dan data yang diperlukan.²³ Wawancara diajukan kepada informan bukan responden, dimana informan adalah individu yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu sehingga disini informan merupakan narasumber, sementara responden adalah individu yang oleh pewawancara ingin mengetahui informasi

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kaulitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), 155.

mengenai diri dari responden itu sendiri seperti pendiriannya, sikapnya, serta pandangannya terhadap isu tertentu.²⁴

Informan dalam wawancara ini adalah pengurus BMT Ben Makmur Kenduren-Wedung-Demak yaitu kepada Manajer BMT Ben Makmur yaitu Bpk. Muhayyun mengenai manajemen umum dan kelembagaan di BMT Ben Makmur dan kepada satu bidang administratif, yaitu Bu Rohmatun dan satu bidang keuangan, yaitu Bu Wahyuningsih.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang telah disiapkan kepada informan. Disini peneliti tidak membatasi jawaban informan dalam penelitian ini, maka informan dapat menjawab bebas sesuai dengan pendapatnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga peneliti melakukan wawancara yang tidak terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertiannya yaitu berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik itu berupa lisan, tulisan, data, gambaran, surat-surat negara dan sejenisnya. Dokumentasi ini peneliti perlukan sebagai bukti dari jawaban dari angket yang telah diberikan.²⁵ Dokumentasi ini berupa foto lokasi dan pengurus BMT Ben Makmur, data-data RAT BMT, kinerja keuangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BMT Ben Makmur.

_

²⁴ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar Press, 2006), 287.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka, 1998), 233.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing, yaitu mengatur data yang telah diperiksa tentang kinerja manajemen BMT Ben Makmur dengan mengklasifikannya dalam 5 aspek yaitu aspek manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva & likuiditas, penyusunan penelitian terstruktur dan mudah dipahami.²⁶
- c. *Scoring*, yaitu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angkaangka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam angket. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai (*grade*).²⁷ Skoring digunakan untuk mendapatkan klasifikasi atau pembagian pada kelas-kelas tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.
- d. *Verifying*, yaitu menguji kebenaran data dilapangan dan menelaah kesesuaiannya dengan pedoman dari Peraturan Menteri Negara

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 67.

²⁷ Ibid., 69.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut menggunakan metode *deskriptif verifikatif*. Menurut Whitney (1960) yang dikutip oleh M. Nazir (1999;63) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Suharsimi Arikunto (2006;8) mengemukakan bahwa, "Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran pengumpulan data di lapangan."²⁸

Peneliti menggunakan teknik ini karena ingin mengetahui kesesuaian atau kebenaran praktek manajemen KJKS/BMT di lapangan dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/ X/2007.

Pola pikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah medote umum ke khusus (*deduktif*).²⁹ Yang digunakan untuk menelaah

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka, 1998), 238.

²⁹Alamsyah, "Pengertian Metode Induktif", dalam http://makalah.update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html, diakses pada 13 Oktober 2014.

gambaran secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (BMT Ben Makmur). Pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data manajemen BMT Ben Makmur, kemudian menganalisis dan memberikan skor untuk dilakukan penelitian melalui pedoman wawancara kepada pihak internal BMT Ben Makmur secara langsung.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini tersusun dengan rapi dan rinci sehingga mudah di pahami, maka penulis menjelaskan susun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang memuat tentang efektifitas kinerja manajemen koperasi syariah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/ X/2007 yang meliputi: manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, serta manajemen likuiditas KJKS/BMT. Serta menjelaskan tentang tinjauan umum BMT yang meliputi, definisi BMT, Bentuk Badan Hukum BMT, serta Laporan Keuangan BMT.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang BMT Ben Makmur, produk dan layanan simpan pinjam pada BMT Ben Makmur, aplikasi produk pada BMT Ben Makmur, kelembagaan pada BMT Ben Makmur, serta laporan keuangan BMT Ben Makmur Tahun 2013.

Bab keempat berisi tentang analisis dari data hasil penelitian yang meliputi analisis terhadap penilaian kinerja manajemen BMT Ben Makmur, yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, serta manajemen likuiditas berdasarkan Peraturan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Dalam bab ini penulis akan melakukan skoring data yang kemudian akan menghasilkan kriteria-kriteria tertentu untuk kelima variabel yang diteliti. Setelah melakukan skoring data penulis akan melakukan verifikasi untuk mengetahui tingkat kesesuain data dilapangan dengan pedoman dari kementerian koperasi.

Bab kelima berisi tentang penutup, bab ini merupakan akhir atau penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran-saran.